



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 12 TAHUN 1993**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA**  
**KAWASAN INDUSTRI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR UNTUK DIBERIKAN STATUS**  
**SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 ditetapkan bahwa suatu Kawasan Industri tertentu dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone);
  - b. bahwa sebagian wilayah usaha Kawasan Industri Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kawasan Industri Makassar, dipandang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat;
  - c. bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
  3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE).

**PERTAMA :** Menunjuk dan menetapkan sebagian wilayah usaha kawasan Industri Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kawasan Industri Makassar seluas 34 hektar termasuk bangunan-bangunan di atasnya, sebagai wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone).

**KEDUA :** Batas-batas Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah :

- 1) Batas sebelah Utara : Jln. Kima Raya II
- 2) Batas sebelah Barat : Jln. Lingkungan
- 3) Batas sebelah Selatan : Jln. Kima Raya I
- 4) Batas sebelah Timur : Jln. Kima III

sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

**KETIGA :** Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional.

**KEEMPAT :** Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status sebagai Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden.

**KELIMA :...**

**KELIMA :** Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Pebruari 1993  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.